

Peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau

* **Taufiq Kurniawan¹, Ranggi Ade Febrin²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : Taufiqkurniawan615@student.uir.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PSM serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lima indikator utama, yaitu peran PSM sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSM telah berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, dan musyawarah desa yang menghasilkan usaha baru dan rencana kerja bersama. Namun, masih ditemukan hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya sinergi dengan pihak terkait.

Kata Kunci: Peran, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

The problem in this study is the suboptimal role of Community Self-Reliance Activists (PSM) in empowering the community in Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency. This study aims to analyze the role of PSM and the obstacles they face in the empowerment process. The research method used is descriptive qualitative. The study applies five key indicators: the roles of PSM as regulator, dynamist, facilitator, innovator, and catalyst. The results show that PSM has contributed significantly through community socialization, entrepreneurship training, and village deliberations that resulted in new business initiatives and development plans. However, challenges such as low community participation, limited facilities, and weak collaboration remain. Increasing PSM capacity and cross-sector synergy is essential.

Keywords : Role, Community Self-Help Activist, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) menjadi sangat strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018, PSM merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. PSM tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek. Menurut Mardikanto (2014), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan komunitas yang lebih baik. Hal ini hanya dapat tercapai jika terdapat fasilitator yang mampu mendorong masyarakat untuk berdaya. Dalam konteks inilah, PSM memiliki peran penting sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator dalam membina serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

Keberadaan PSM di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah menunjukkan kontribusi positif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh PSM, seperti sosialisasi, pelatihan, dan musyawarah desa, telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, PSM juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sinergi antara PSM, pemerintah desa, dan instansi terkait.

Berdasarkan rekapitulasi data kegiatan pendampingan PSM di Desa Tanjung Bungo pada tahun 2024, terlihat adanya usaha berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Tabel berikut menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PSM selama periode Januari hingga Maret 2024:

Tabel 1.
Pendampingan PSM

No	Bulan	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Peserta	Hasil Pendamping
1	Januari 2024	Sosialisasi Pemberdayaan	Kelompok Masyarakat	20	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program desa
2	Februari 2024	Sosialisasi Pemberdayaan	Pemuda Desa	15	Peserta memahami dasar wirausaha, terbentuk dua usaha baru
3	Maret 2024	Sosialisasi Pemberdayaan	Seluruh Elemen Desa	30	Terbentuk rencana kerja desa hasil kesepakatan bersama

Sumber: Rekap Pendampingan PSM, 2024

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PSM ini menunjukkan adanya proses pemberdayaan yang aktif dan terencana. Namun demikian, masih terdapat kendala yang harus diatasi untuk mencapai pemberdayaan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana peran PSM dalam pemberdayaan masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Penggerak Swadaya Masyarakat, aparat desa, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, dengan pemilihan lokasi secara purposive karena desa ini aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami peran PSM dalam proses pemberdayaan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) di Desa Tanjung Bungo terbukti cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Dalam perannya sebagai regulator, PSM terlibat dalam penyusunan mekanisme pemberdayaan melalui musyawarah desa. Sebagai dinamisator, PSM memotivasi masyarakat, khususnya pemuda, untuk mengikuti pelatihan dan terlibat dalam usaha desa. Sebagai fasilitator, PSM mempermudah akses masyarakat terhadap pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam peran inovator, PSM mengembangkan program kewirausahaan yang sesuai dengan potensi lokal. Sebagai katalisator, PSM mendorong terjadinya perubahan sikap masyarakat menuju kemandirian. Peran PSM dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Regulator

Memfasilitasi musyawarah desa sebagai forum partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam pelaksanaannya, PSM bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa suara dan aspirasi warga benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan dialogis dan keterbukaan, musyawarah desa yang difasilitasi PSM tidak hanya menghasilkan program yang sesuai dengan potensi dan permasalahan desa, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas pelaksanaan program tersebut.

2. Dinamisator

Berperan penting dalam membangkitkan motivasi dan semangat warga untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan desa. PSM melakukan pendekatan personal dan kelompok untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam memajukan desa mereka sendiri. Melalui sosialisasi, diskusi, dan pemberian contoh nyata, PSM menanamkan rasa percaya diri dan kepedulian warga terhadap program-program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan.

3. Fasilitator

Berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai lembaga terkait. Dalam menjalankan perannya, PSM tidak hanya membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada, tetapi juga menghubungkan mereka dengan instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun pihak swasta yang dapat memberikan dukungan sumber daya. PSM memfasilitasi akses terhadap pelatihan, bantuan teknis, hingga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Dengan kemampuan komunikasi dan koordinasi yang dimiliki, PSM menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa.

4. Inovator

Berperan dalam mengembangkan program-program kreatif yang mampu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat desa. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah pengembangan budidaya lebah kelulut dan sistem akuaponik, yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, PSM tidak hanya memperkenalkan metode baru yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis, tetapi juga membimbing masyarakat dalam proses penerapan dan pengelolaan kegiatan tersebut. Inovasi ini menjadi peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan warga serta menciptakan lapangan kerja di lingkungan desa.

5. Katalisator

Berperan dalam mendorong terjadinya perubahan sikap dan pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing. PSM memotivasi warga untuk tidak lagi bergantung pada bantuan pihak luar, tetapi mendorong mereka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara bersama. Melalui pendekatan yang persuasif dan berkelanjutan, PSM berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemandirian desa hanya dapat dicapai dengan kerja keras, partisipasi aktif, dan kolaborasi antar warga. Dengan demikian, PSM menjadi penggerak penting dalam membentuk budaya masyarakat yang proaktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang berasal dari kekuatan masyarakat itu sendiri.

Tidak lagi bergantung pada bantuan pihak luar, tetapi mendorong mereka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara bersama. Melalui pendekatan yang persuasif dan berkelanjutan, PSM berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemandirian desa hanya dapat dicapai dengan kerja keras, partisipasi aktif, dan kolaborasi antar warga. Dengan demikian, PSM menjadi penggerak penting dalam membentuk budaya masyarakat yang proaktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang berasal dari kekuatan masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memiliki posisi yang penting dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat di

Desa Tanjung Bungo. Peran tersebut diwujudkan melalui lima bentuk utama, yaitu sebagai pengatur (regulator), penggerak (dinamisator), pendamping (fasilitator), pencetus ide (inovator), dan pemicu perubahan (katalisator). Dalam pelaksanaannya, PSM berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, serta forum musyawarah desa yang berhasil melahirkan inisiatif usaha dan perencanaan berbasis partisipasi. Kendati demikian, pelaksanaan peran ini masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat, minimnya fasilitas penunjang, prosedur birokrasi yang berbelit, serta hambatan sosial dan keterbatasan waktu yang dihadapi warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PAN-RB. (2018). Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Jakarta: Kemenpan RB.
- Mardikanto, T. (2014). Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Musanef. (2011). Ilmu Pemerintahan Indonesia. Sinar Harapan.
- Ndraha, T. (2011). Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. Jakarta
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.
- Sumardjo. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. IPB Press.
- Syafiie, I. (2005). *Ilmu Pemerintahan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.
- Wrihatnolo, R., & Dwidjowijoto, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Praktis*. Pustaka Pelajar.